BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Tujuan Umum Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

Amrika Serikat (AS) adalah sebuah republik federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Kecuali Alaska (utara Kanada) & Hawaii (lautan Pasifik), 48 negara bagian lainnya serta distrik federalnya terletak di Amerika Utara. Amerika Serikat berbatasan dengan Meksiko dan Teluk Meksiko di sebelah selatan, dan dengan Kanada di sebelah utara dan barat laut (eksklave Alaska). Di sebelah barat negara ini berbatasan dengan Samudra Pasifik dan di sebelah timur dengan Samudra Atlantik. Amerika Serikat merupakan negara demokrasi konstitusional dengan sistem *three-tier* dan institusi kehakiman yang bebas. Terdapat tiga peringkat yaitu nasional, negara bagian dan pemerintahan lokal yang mempunyai badan legislatif serta eksekutif dengan bidang kuasa masing-masing. Negara ini menggunakan sistem persekutuan atau federalisme di mana di negara pusat dan negara bagian berbagi kuasa. Negara pusat berkuasa terhadap beberapa perkara seperti pencetakan mata uang Amerika serta kebijakan pertahanan (Resident Population Data – 2010". U.S. Census Bureau. 2010, diakses 12 Agustus 2011).

Kebijakan luar negeri merupakan serangkaian proses untuk menghasilkan *output* yang ditujukan keluar wilayah suatu negara dengan tujuan untuk mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri tidak akan pernah lepas dari kepentingan nasional suatu negara. Demikian pula halnya dengan

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

pemerintah Amerika Serikat, segala sesuatu akan dilakukan untuk menggapai apa yang menjadi kepentingan nasionalnya. Robert Kagan dan William Kristol mengatakan bahwa hal yang dihadapi Amerika Serikat akan selalu berbeda dari waktu ke waktu, sehingga kebijakan yang diambil pada saat ini belum tentu sama dengan yang akan datang. Menurut mereka Amerika sekarang menghadapi banyak tantangan dalam upaya menggapai kepentingannya, misalnya dalam usaha Amerika Serikat memelihara dan memperkuat kekuatan hegemoni global, seperti yang telah dikatakan Presiden George W. Bush, bahwa Amerika Serikat harus membangun sebuah tatanan dunia yang baru. Tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat harus dibawa kepada apa yang dikatakan oleh Charles Krauthammer, dari sebelumnya sebagai momen unipolar ke sebuah era unipolar (Kagan dan Kristol, 2000:6).

Apa yang menjadi fokus dari kebijkan luar negeri Amerika Serikat belum tentu sama dari satu periode pemerintah ke periode pemerintah lainnya, akan tetapi tujuan dasar dari kebijkan luar negeri Amerika Serikat adalah:

a. Keamanan Nasional

Amerika Serikat akan selalu berupaya agar tetap bebas, aman, dan merdeka dari segala pengaruh maupun invasi dari pihak luar yang tidak diinginkan. Pemerintah Amerika Serikat menitikberatkannya pada (*The National Security Strategy of the Untited State of America, 2006*) :

- Asprasi kemenangan bagi martabat manusia:
- Memperkuat aliansi untuk memerangi terorisme global dan bekerja untuk mencegah serangan yang dilakukan mereka;

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

- Bekerjasama dengan yang lain untuk menumpas konflik regional;
- Mencegah musuh yang akan mengancam negara beserta aliansi negaranya berupa kehadiran senjata pemusnah massal (*Weapon Mass Destruction/WMD*);
- Membakar semangat pertumbuhan ekonomi global dalam sebuah era baru melalui pasar bebas dan perdagangan bebas;
- Memperluas siklus pembangunan dengan masyarakat terbuka dan membangun infrastruktur demokrasi;
- Mengembangkan agenda untuk aksi kerja sama dengan pusat kekuatan global yang lain;
- Mentransformasikan lembaga keamanan nasional Amerika Serikat untuk menghadapi tantangan dan kesempatan di abad ke-21; dan
- Mengikutsertakan kesempatan dan mengahadapi tantangan globalisasi.

b. Perdamaian Dunia

Merupakan tujuan jangka panjang Amerika Serikat. Hal ini merupakan cara terbaik untuk melindungi serta menjamin keamanan nasional Amerika Serikat. Agar tujuan ini terwujud, maka kerjasama yang baik dengan negara-negara maupun organisasi-organisasi internasional harus dijalin Amerika Serikat dalam menyelesaikan masalah internasional Amerika Serikat. Dan sebagai cara untuk memperkuat jalinan ini, maka Amerika Serikat pun berusaha mengirimkan bantuan-bantuan luar negerinya ke negara-negara lain.

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

c. Pemerintahan Sendiri (*Self Government*)

Amerika Serikat senantiasa siap untuk memberikan bantuannya ke negara-negara yang akan membentuk pemerintah sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Amerika juga siap memberikan dukungannya kepada negara-negara yang menjalankan atau menganut sistem demokrasi dan juga membantu negara-negara lain untuk menjadi lebih demokratis. Hal ini dipandang oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai salah satu cara terbaik melindungi kepentingan nasionalnya.

d. Perdagangan Bebas Terbuka (*Free Open Trade*)

Dalam kenyataannya Amerika Serikat memerlukan pasar di luar negeri untuk memasarkan produk-produknya, sehingga Amerika Serikat akan memberikan dukungannya terhadap segala usaha untuk mempertahankan dan memberlakukan suatu sistem perdagangan yang bebas dan terbuka dengan negara-negara lain di dunia dalam rangka pencpaian kepentingan nasional Amerika Serikat.

3.1.1 Asia Tenggara Dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Jumlah penduduk yang besar, kondisi sosial budaya yang beragam, sistem pemerintahan yang cenderung lemah, serta krisis ekonomi yang masih belum pulih, adalah gambaran kondisi aktual yang dialami sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara, secara tidak langsung mempengaruhi kepentingan-kepentingan AS salah satunya sektor perekonomian yakni karena dengan jumlah penduduk yang sangat besar secara otomatis Asia Tenggara merupakan pasar yang luas tidak hanya untuk produk tetapi juga bagi industri jasa AS. Asia Tenggara adalah patner ekspor sekaligus patner impor AS. Selain itu, Asia Tenggara juga merupakan

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

kawasan tujuan bagi investasi luar seperti Jepang, Cina, Australia dan tentunya AS.

Secara ekonomi Asia Tenggara merupakan bagian perdagangan dengan volume yang tinggi bagi AS dibandingkan dengan negara Jepang, Korea, Taiwan, dan Australia, termasuk impor minyak, transit *Sea-lanes of Communications* (SLOCs) negara-negara tersebut di Asia Tenggara. Sedangkan dalam perspektif militer, jalur laut Asia Tenggara sangat penting untuk pergerakan Angkatan Bersenjata AS dari Pasifik Barat ke Samudra Hindia dan Teluk Persia.

Terdapat beberapa kepentingan AS secara politis di kawasan ini. Terutama terhadap Indonesia, sebagai negara keempat terbesar di dunia, dengan kumunitas muslim yang terbesar di seluruh dunia, negara eksportir minyak dan gas terbesar di kawasannya.

Secara garis besar ada dua kepentingan AS di Asia Tenggara berkaitan dengan letaknya yang strategis:

1) Asia Tenggara membuka garis laut, karena sebagian besar perdagangan dunia melewati selat Malaka.
2) Asia Tenggara penting sebagai pos untuk pergerakan kehadiran militer AS di Pasifik Barat dan Samudera Hindia.

Asia Tenggara secara geopolitik sangat krusial tidak hanya untuk kepentingan nasional AS, tetapi juga secara global. Jalur laut yang melintasi kawasan Asia Tenggara mempunyai fungsi yang vital bagi ekonomi Jepang dan Republik Korea, Cina dan termasuk juga AS sendiri (Triwahyuni, Majalah Ilmiah Unikom, vol. 9 No. 1).

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

Asia Tenggara adalah wilayah negara yang beragam dan budaya yang menyatukan semua kekuatan utama dari Asia Pasifik dalam berbagai kepentingan strategis. Dengan demikian sebuah arena terbuka dengan potensi untuk berbagai kebijakan-kebijakan strategis, pilihan, dan hasilnya. Kepentingan utama Amerika di Asia Tenggara secara tradisional telah dianggap sebagai berikut; (1) Promosi stabilitas dan keseimbangan kekuasaan dengan tujuan strategis menjaga Asia Tenggara dari didominasi oleh suatu kekuasaan (2) Pencegahan dari objek kekuasaan wilayah lain, (3) Kebebasan navigasi dan perlindungan jalur laut, (4) Perdagangan dan investasi kepentingan, (Dengan perdagangan bilateral hampir $ 168.500.000.000 di tahun 2006, kelompok 10-anggota ASEAN sudah kolektif mitra dagang kelima AS terbesar, (5) Dukungan sekutu perjanjian dan partner kawasan, dan (6) Promosi demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama (Triwahyuni, Majalah Ilmiah Unikom, vol. 9 No. 2).

Untuk mempromosikan kepentingan relatif di Asia Tenggara, AS secara umum mengikuti strategi yang memelihara keseimbangan kekuasaan di kawasan melalui aliansi dan pelatihan militer.

Setelah tragedi 9/11, *item* baru ditambahkan ke daftar kepentingan utama AS di Asia Tenggara: Mencegah wilayah dari menjadi dasar untuk kegiatan teroris. Pada bulan Juni 2004, Sekretaris Asisten Negara untuk Asia Timur dan Pasifik, James Kelly menyatakan terhadap Gedung Komite Hubungan Internasional bahwa "ini adalah masa transisi" di wilayah tersebut dan menekankan bahwa Asia Tenggara ada pada bagian atas daftar prioritas kebijakan yakni melancarkan perang melawan teror diidentifikasi. Filipina dan Thailand

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

sebagai sekutu tradisional dan mitra strategis di kawasan, dan Singapura sebagai mitra yang efektif untuk membangun keamanan regional. Dia juga membahas Rencana Kerjasama ASEAN dan *Enterprise* untuk *ASEAN Initiative* (EAI) yang berusaha untuk memperkuat hubungan Amerika dengan ASEAN. Berdasarkan EAI AS berusaha untuk mengembangkan perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara Asia Tenggara. Singapura adalah yang pertama untuk menandatangani perjanjian dengan AS. Diskusi dengan Thailand dan Malaysia sedang berjalan.

Dalam beberapa tahun terakhir, AS telah mengambil kebijakan yang lebih aktif terhadap Asia Tenggara. Pada tahun 2005, Bush dan para pemimpin ASEAN mengumumkan Pernyataan Visi Peningkatan Kemitraan Bersama. Pada tahun 2006, Sekretaris Negara AS Rice dan menteri luar negeri ASEAN menandatangani Rencana Aksi Peningkatan Kemitraan, yang mencakup delapan prioritas: kerja sama ekonomi, kesehatan, beasiswa, informasi dan teknologi komunikasi, transportasi, manajemen energi bencana dan manajemen lingkungan. Pada tahun yang sama, AS dan ASEAN juga menandatangani *Trade and Investment Framework Agreement (TIFA).*

Kebijakan AS terhadap Asia Tenggara telah kadang-kadang bahkan dipandang sebagai *ad hoc,* episodik dan reaktif dalam melawan teror dan tidak perlu sempit di fokus. Menurut beberapa pengamat, Asia telah menjadi korban tak terduga dari perang Irak bagi AS.

Menurut laporan AS tahun 2006 untuk Kongres, Telah menegaskan bahwa salah satu alasan untuk memaksa langkah-langkaeh untuk memodernisasi negara-

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

negara Asia Tenggara telah meningkatkan kemandirian dalam menanggapi pengurangan kelemahan kebijakan telah dirasakan AS di kawasan itu (Hui, US Policy Towards Southeast Asia dalam HOME > Publications > Scholarly Journals > Contemporary International Relations > Volume 18 Number 3 May/Jun. 2008) .

Daari penjelasan di atas dapat kita asumsikan bahwa AS memiliki kepentingan-kepentingan beragam di Asia Tenggara dan salah satunya adalah war on terrorism, maka dari hal ini kita dapat mengetahui berjalannya poltik luar negeri AS untuk Asia Tenggara.

3.1.2 Kebijakan Luar Negeri AS dalam Masalah Terorisme di Asia Tenggara

Pemikiran yang kemudian mendorong AS menitikberatkan pengembangan militernya pasca 11 September adalah bahwa dilihat dari perpektif militer, serangan yang terjadi dengan mudah tanpa resistensi yang berarti dari pihak yang berwenang di AS pada saat itu telah memperlihatkan kelemahan intelejen dan sistem pertahanan AS (http://dewitri@wordpress.com, *Serangan 11 September 2001 dan perubahan kepentingan serta tujuan kebijakan pertahanan Amerika Serikat*, diakses 6 Juni 2011)

Dengan ditetapkannya Al-Qaeda sebagai tersangka utama serangan 11 September dan resmi ditetapkannya *Jemaah Islamiah* (JI) sebgai jaringan Al-Qaeda, menjadi legitimasi AS untuk memberantas jaringan terorisme secara global. Maka tidak ada lagi yang dapat menghentikan perluasan kehadiran militer AS di Asia Tenggara, dimana AS mengklaim Asia Tenggara didiami banyak

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

kelompok/jaringan Al-Qaeda serta kawasan yang subur bagi pertumbuhan dan perkembangan teroris. Bahkan secara tidak langsung, sejak PBB belum menetapkan JI sebagai jaringan Al-Qaeda, AS telah lebih dahulu menetapkan kawasan Asia Pasifik sebgai prioritasnya untuk melawan terorisme internasional dengan program yang disebut "*United States-Pacific Command* (USPACOM)" (http://www.usinfo.state.com, diakses 6 Juni 2011).

Pentingnya kawasan Asia Tenggara bagi AS sebenarnya mulai diperbincangkan kembali sebelum serangan 11 September terjadi. Beberapa tahun kebelakang kelompok *tink-tank* AS telah banyak mendiskusikan perlunya intervensi AS yang lebih agresif ke kawasan Asia Tenggara

Meskipun tidak pernah ucapkan secara langsung, indikasi AS dibawah pemerintahan Bush untuk membuka "*a second front*" di Asia Tenggara, bukanlah sebuah kebetulan maupun respon atas adanya ancaman serius terhadap AS. Serangan 11 September telah dipergunakan oleh Gedung Putih (*the White House*) dan Pentagon untuk mengangkat kembali penurunan kehadiran militer AS di Asia Tenggara dan untuk lebih agresif lagi mengejar kepentingan ekonomi dan strategis AS di kawasan ini (http://www.wsws.org/articles/2002/apr2002/asia-a26.html, diakses 6 Juni 2011).

Global war on terrorism menjadi sebuah instrumen parlemen yang baik sekali untuk memperluas kehadiran militer AS di Asia Tenggara tanpa menggubris sikap permusuhan yang diperlihatkan penduduk lokal. Dibawah tekanan besar Washington, para pemimpin didesak untuk memberikan dukungan, termasuk penggunaan tempat-tempat untuk *staging militer* dan pangkalan militer

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

dan jaminan atas hak pemakaian ruang udara untuk loncotan AS ke Afghanistan (http//dewitri_wordpress.com, *Serangan 11 September 2001 dan perubahan kepentingan serta tujuan kebijakan pertahanan Amerika Serikat,* diakses 6 Juni 2011).

Sejumlah kerjasama yang dilaksanakan Filipina-AS seperti "*Visiting Force Agreement*", "*Rep.Philippines-U.S Military Assistance*" dan "*Mutual Defense Treaty*", menimbulkan kebutuhan akan ikatan hubungan kerjasama yang lebih formil. Dalam rangka mengejar legalitas tersebut, maka pada 21 November 2002, Departemen Pertahanan Nasional Filipina dan Departemen Pertahanan AS menandatangi kesepakatan yang disebut dengan "*Mutual Logistic Support Agreement* (MLSA)"(http://www.mangossubic.com/local news 06.htm, diakses 6 Juni 2011).

Dalam waktu singkat, perang melawan terorisme yang dikumandangkan AS telah menghasilkan banyak simpati dan dukungan. Untuk kekuatan Udara, dukungan yang diberikan negara-negara Asia Tenggara masih sekitar penggunaan ruang udara. Pemerintah Filipina mengizinkan AS untuk mempergunakan wilayah udara Filipina termasuk penggunaan lapangan udara untuk keperluan transit dalam upaya menciptakan perdamaian dunia (Rabasa, 2001. 8).

Dalam kunjungan President Indonesia Megawati ke Washington D.C. pada 19 September 2002, ia menyampaikan rasa simpatinya atas peristiwa 11 September yang menimpa AS kepada Presiden Bush, dan mendukung tindakan AS untuk memberantas jaringan terorisme. Selanjutnya Indonesia juga

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

menawarkan kerjasama, termasuk memberikan hak terbang bagi pesawat AS di wilayah udara Indonesia dalam rangka mendukung perang melawan terorisme

Tidak berbeda dengan Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam juga tidak terlalu aktif dalam memberikan fasilitas militer bagi AS. Padahal AS sempat meminta Malaysia untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai tempat *"Regional Training Centre to Counter Terrorism"* dia Asia Tenggara, yang menjadi program yang sedang direncanakan AS (Capie, 2002:5-6).

Indikasi peningkatan kehadiran militer AS di Asia Tenggara dapat dilihat dari tersedianya beberapa fasilitas militer yang diberikan oleh negara-negara Asia Tenggara untuk kepentingan AS. Fasilitas-fasilitas tersebut meliputi kekuatan darat, (seperti penempatan pasukan, daerah latihan, dan logistik), pelabuhan (fasilitas dok, dan kunjungan kapal perang), penggunaan fasilitas ruang udara dan transit, serta kegiatan inteligen. Hal ini dapat melihat melalui Indikasi proyeksi peningkatan militer AS di Asia Tenggara, diantaranya:

1. Kekuatan Darat

Secara umum Asia Tenggara mendukung usaha AS dalam rangka perang memberantas terorisme. Hanya saja bentuk dukungan yang diberikan terlihat sangat variatif. Jika Filipina dengan konkrit menerima pasukan AS ke wilayahnya meskipun dengan dalih "joint exercise", Singapura juga memberikan fasilitas yang luar biasa bagi kapal perang AS di pelabuhannya, sebaliknya beberapa negara seperti Malaysia dan Indonesia masih ragu-ragu untuk bersikap demikian. Perluasan kehadiran militer AS di daratan Asia Tenggara pasca 11 September sepertinya dimulai dengan pengerahan pasukan AS ke Filipina dalam program

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

Baliktan 02-1. (*The National Bureau of Asian Research: Washington D.C., 2002),* hal. 32)

2. Fasilitas pelabuhan, secara formal, AS tidak lagi memiliki pangkalan laut permanen di Asia Tenggara setelah Subic Bay ditutup. Subic Bay merupakan mata rantai yang vital bagi Angkatan Laut AS karena menghubungankan kawasan-kawasan Samudra pasifik dan Samudra Hindia sehingga lokasinya menguasai Laut Cina Selatan dan selat-selat Indonesia. Demikian penting nilainya, sehingga saat masalah pangkalan ini mulai timbul, AS segera melakukan analisis untuk kemungkinan "penggantinya" (Hasnan Habib, 2003: 77)

3. Fasilitas Penggunaan Ruang Udara

Dalam waktu singkat, perang melawan terorisme yang dikumandangkan AS telah menghasilkan banyak simpati dan dukungan. Untuk kekuatan Udara, dukungan yang diberikan negara-negara Asia Tenggara masih sekitar penggunaan ruang udara. Pemerintah Filipina mengizinkan AS untuk mempergunakan wilayah udara Filipina termasuk penggunaan lapangan udara untuk keperluan transit dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Dan Filipina tercatat sebagai salah satu negara yang menyediakan tempat (*staging*) bagi pesawat-pesawat tempur AS dalam perang AS dan koalisinya ke Irak/Aghanistan (2001). (Rabasa, *Southeast Asia After 9/11: Regional Trends and U.S. Interests, Testimoni yang diperuntukan kepada Subcommittee on East Asia dan The Pacific House of Representatives Coomittee on International Relations* pada 12 Desember 2001 (Washington D.C: RAND Publication, 2001).

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

3.2 Gambaran Umum Perkembangan Terorisme di Asia Tenggara

Asia Tenggara semakin mendapat sorotan dunia internasional lantaran sejumlah peristiwa teror yang terjadi secara bertubi-tubi. Korban dalam jumlah besar dan target serangan yang merupakan simbol-simbol Barat merupakan persamaan dari serentetan teror yang terjadi di Indonesia, negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Pelaku teror ditengarai suatu kelompok yang memiliki hubungan dengan Al Qaeda (AQ) di Afghanistan, bernama Jemaah Islamiyah. Padahal AQ diindikasikan sebagai kelompok yang bertanggungjawab atas teror 11 September 2001 di AS. Beberapa minggu setelah serangan 11 September, jaringan dari Al-Qaeda pun terungkap. Jaringan tersebut dikenal sebagai Jemaah Islamiyah (*Islamic Group*), yang berkembang di Malaysia, Singapura, Indonesia,Filipina, Australia, Thailand, dan Pakistan. Demi mencapai tujuan membangun negara Islam di Asia Tenggara (terpusat di Indonesia), pimpinan JI telah beraliansi dengan grup islam militan lainnya dalam berbagi pelatihan, perlengkapan senjata, sokongan modal, dan pengendalian serangan. Khususnya JI telah bergabung dengan grup separatis

The Moro Islamic Liberation Front (MILF) (Abuza, http://www.mha.gov.sg/wp/complete.zip *"Terrorism in Southeast Asia," in National Bureau of Asian Research*, Strategic Asia 2002. Hal 3. Diakses 01 Juni 2011). Beberapa laporan mengindikasikan bahwa ka *camps* JI akan melanjutkan operasinya di territori MILF di Mindanao (Ellen Nakashima, "*Indonesian Militants 'Keep Regenerating'*, Washington Post, 25 Maret 2004).

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

Teror memang bukan hal baru di Asia Tenggara, sebab ada beberapa kelompok pemberontak yang kerap menggunakan kekerasan sehingga menyebarkan ketakutan di masyarakat. Berikut ini adalah beberapa kelompok pemberontak dan teroris yang ada di Asia Tenggara.

Di kawasan Asia Tenggara peristiwa teror banyak terjadi di Indonesia, Filipina dan Thailand. JI diduga berada di balik teror yang melanda Indonesia, sedangkan Abu Sayyaf bertanggunggawab atas teror yang terjadi di Filipina, dan kelompok pemberontak adalah pihak yang kerap menebar ketakutan lewat sejumlah aksi kekerasan di Thailand. Tidak mengherankan jika 3 kelompok tersebut, utamanya JI, paling sering disebut-sebut sebagai pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi insiden teror (Jan Aart Scholte, Globalization: A *Critical Introduction* dalam Bantarto Bandoro, Masalah-masalah Keamanan Internasional Abad 21, makalah pada seminar pembangunan hukum nasional VIII di Denpasar, 14-18 Juli 2003)

Jemaah Islamiyah, Kelompok ini berakar dari Darul Islam, yakni sebuah gerakan yang menginginkan diterapkannya hukum Islam di Indonesia. Darul Islam berkembang di akhir tahun 1940an dan terus berupaya melawan pemerintahan RI. Pada 1969, Abu Bakar Ba'asyir bersama dengan Abdullah Sungkar diduga melakukan operasi untuk mengembangkan Darul Islam.

Menurut PG Rajamohan dalam tulisannya tentang JI, di era pemerintahan Soeharto, Ba'asyir pernah dijebloskan ke penjara tanpa peradilan lantaran dinilai membahayakan. Karenanya usai keluar dari penjara, Ba'asyir memilih pergi ke Malaysia pada 1985 dan menjadi guru mengaji. Saat itulah dia dianggap sebagai

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

pendiri JI, di mana pengikutnya tersebar hingga di luar Malaysia. Ba'asyir bahkan merekrut sukarelawan untuk berjuang melawan Brigade anti-Muslim Soviet di Afghanistan.

Pada 1990, Ba'asyir bertemu Hambali, seorang pria yang menginginkan berdirinya kekhalifahan Islam di Asia Tenggara yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunai dan Kamboja. Kemudian Ba'asyir menjadi pemimpin politik organisasi tersebut, sedangkan Hambali menjadi pemimpin militer. Bahkan Hambali mendirikan perusahaan Konsojaya untuk memfasilitasi pencucian uang sebagai bentuk dukungan pada keuangan dan logistic JI. Meski demikian Ba'asyir menyatakan dirinya tidak terkait dan tidak tahu menahu tentang JI.

Rajamohan berpendapat, JI mendukung gerakan Islam di seluruh dunia. Berdasar laporan AS, banyak pemimpin JI yang mendapat pelatihan di *camp* teroris Pakistan dan Afghanistan. Karena itulah mereka memiliki hubungan dekat dengan Al Qaeda dan Taliban. Lebih dari itu, AQ juga diyakini sebagai sumber pendana utama bagi JI dan menyediakan logistik untuk mendukung kegiatan teroris (Abuza,http://www.mha.gov.sg/wp/complete.zip *"Terrorism in Southeast Asia," in National Bureau of Asian Research*, Strategic Asia 2002. Hal 7-8 Diakses 01 Juni 2011).

Peneliti terorisme Sydney Jones memaparkan, JI dibagi dalam 4 wilayah operasi di Asia Tenggara, yakni:

Mantiqi 1: Malaysia, Singapura dan Thailand Selatan. Menitikberatkan pada pendanaan. Mantiqi 2: Indonesia (Jawa dan Sumatera). Dititikberatkan sebagai

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

wilayah jihad. Mantiqi 3: Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia Timur, Indonesia (Kalimantan dan Sulawesi). Dititikberatkan sebagai daerah pelatihan. Mantiqi 4: Australia. Menitikberatkan pada aspek ekonomi dan pendanaan. Tujuan utama dari JI adalah membentuk Negara Islam yang meliputi Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia dan Filipina. Aksi teror yang dilakukan JI seperti terlihat dalam pengeboman di Bali dan di Jakarta adalah tipikal AQ, di mana yang menjadi target serangan adalah kepentingan AS dan sekutunya.

Sejak tahun 2000, JI aktif melakukan teror yang antara lain dengan melakukan pengeboman di Bali pada 2002 dan 2005, pengeboman Kedubes AS di Jakarta, pengeboman Hotel JW Marriott Jakarta pada 2004, dan yang terbaru adalah pengeboman Hotel Ritz Carlton dan JW Marriott Jakarta pada pertengahan 2009. Deplu AS menyatakan, pada 2001 diperkirakan ada 200 kegiatan yang dilakukan anggota JI di Malaysia. Di saat yang sama, pemerintah Singapura memperkirakan total anggota JI hampir 5.000 orang (Abuza, http://www.mha.gov.sg/wp/complete.zip *"Terrorism in Southeast Asia," in National Bureau of Asian Research*, Strategic Asia 2002. Hal 9-10. Diakses 01 Juni 2011).

Abu Sayyaf Group (ASG), Kelompok Abu Sayyaf terbentuk pada 1991 dan berlokasi di Filipina selatan. Pendirinya adalah Abduragak Abubakar Janjalani yang tewas tertembak oleh polisi pada 1998. Pemimpin selanjutnya yakni Khaddafi Janjalani pernah masuk dalam daftar teroris paling dicari oleh FBI sebelum tewas pada 2006. Jumlah anggotanya kadang menurun dan di waktu lain meningkat tajam, bahkan pernah tercatat ada 4.000 orang yang menjadi anggota

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

aktif. Tujuan kelompok ini adalah mendirikan negara Islam di Mindanao Barat dan di Kepulauan Sulu untuk selanjutnya mendirikan pan negara Islam di Asia Tenggara. ASG dikenal sebagai kelompok separatis paling keras. Mereka menggunakan teror untuk mendapatkan keuntungan finansial ataupun dalam menyerukan jihad. Kelompok ini tidak segan-segan menculik, mengebom, membunuh, dan juga pemerasan. ASG ditengarai memiliki keterkaitan dengan JI karena mereka pernah memberikan tempat perlindungan bagi anggota JI dari Indonesia yang menjadi buron.

Aksi kekerasan di Filipina juga dilakukan kelompok separatis Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang beroperasi di Mindanao, Kepulauan Sulu, Basilan dan Jolo. Sejak 1978 kelompok ini telah melakukan pemberontakan bersifat militer terhadap pemerintahan Filipina. Anggota organisasi ini sebelumnya tergabung *Moro National Liberation Front* (MNLF). Pemisahan dilakukan karena MNLF bersedia berdamai dengan pemerintah.

Seperti halnya dengan ASG, MILF juga memiliki hubungan istimewa dengan JI. MILF telah memberikan izin untuk dilakukannya latihan militer bagi anggota JI di kamp-kamp yang dimilikinya. Kelompok ini juga kerap memberikan bantuan kepada ASG yang beroperasi di Basilan dan Jolo.

Bersama dengan JI, kelompok pemberontak WKR bergabung dan berjuang bersama kaum Mujahidin di Afghanistan (Dian Firmansyah dkk, makalah untuk *Defence and Security Management Studies ITB – Cranfield University*: *The Emergence of Terrorism in South East Asia*, Agustus 2008).

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

Untuk menyerang terorisme di Asia Tenggara, staf adminstrasi dan Kongres Bush telah menyiapkan beberapa kampanye menyerang teroris untuk memberantas terorisme di Asia Tenggara. Walaupun begitu tertarik untuk menghancurkan terorisme, pemerintah Asia Tenggara harus menyeimbangkan konsentrasi keamanan dengan pertimbangan politik dalam negeri.

Sejak akhir pertengahan 1990-an jaringan teroris Al-Qaeda telah membuat serangan yang signifikan. Al-Qaeda Asia Tenggara pada dasarnya dikendalikan oleh Timur Tengah. Mereka membuat anggota lokal, didominasi oleh anggota arab Al-Qaeda, mereka mengerjakan tugas lokal yang mendukung jaringan operasi secara global. Jaringan keanggotaan ini meningkat drastis yang pada dasarnya untuk lebih mengontrol untuk mengadakan pertemuan di Asia Tenggara yang berencana menyerang target Barat.

Jaringan Al-Qaeda terus meluas di kawasan Asia Tenggara, mulai dari Filipina, Malaysia, Singapura, dan yang paling terbaru adalah Indonesia. Pada kasus 11 September, pimpinan Al-Qaeda mengambil keuntungan pada lemahnya kontrol perekonomian Asia Tenggara, yang mana digunakan sebagai tempat yang tempat dalam menumbuhkan dana untuk jaringan. Menurut ahli yang mengkaji Al-Qeda pada 2002, satu sampai lima puluh organisasi Al-Qaeda terpusat di Asia Tenggara (Audrey Kurth Cronin, *Foreign Terrorist Organizations, Al Qaeda after the Iraq Conflict* on http://www.fas.org/sgp/crs/index.html, diakses 20 Mei 2011).

Di Indonesia, jaringan ini telah membentuk atau melatih grup lokal yang telah terlibat konflik di luar negeri. Pada Oktober 2001 seaat setelah serangan di Bali AS telah mengidentifikasi JI sebagai organisasi teroris. Segera setelah dewan

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

keamanan PBB menambahkan jaringan JI ini kedalam kelompok teroris, semua anggota PBB membekukan semua aset organisasi dan melarang seluruh anggota untuk memasuki teritori mereka. Sejak Desember 2001 lebih dari 250 tersangka anggota JI termasuk pemimpinnya telah ditangkap. Termasuk tersangka pengeboman Bali Indonesia (Audrey Kurth Cronin, *Sanctioning Designated Foreign Terrorist Organizations*, CRS Report RL32120)

Ada perdebatan yang dipertimbangkan mengenai hubungan Jamaah Islamiyah dengan Al-Qaeda. Walaupun banyak peneliti pertamanya beranggapan bahwa JI adalah aliansi dari Al-Qaeda di Asia Tenggara, tapi laporan terakhir menyebutkan bahwa dari interogasi JI dan Al-Qaeda menunjukan kedua grup tersebut merupakan organisasi terpisah, Al-Qaeda fokus terhadap peran global orang-orang Barat dan institusi Barat, sementara JI fokus kedalam Muslim radikal di Asia Tenggara (dimulai di Indonesia) dan beberapa pemimpin JI mengatakan menyerang target barat dapat menghancurkan tujuan utamanya (Abuza, 2003.150).

Dikatakan bahwa kedua jaringan berkembang dalam hubungan yang saling menguntungkan dengan adanya beberapa keanggotaan yang saling melengkapi. Mereka berbagi pelatihan di Pakistan, Afghanistan, dan Mindanao. Al-Qaeda telah menyiapkan JI dengan dukungan keuangan yang menjanjikan. Biasanya operasi-operasi mereka berupa Al-Qaeda menyiapkan dana ahli teknikal sementara JI menyiapkan material lokal (seperti material pembuatan bom) (Sidney Jones, *"Jemaah Islamiyah in South East Asia: Damaged but Still Dangerous,"International Crisis Group Report No. 63*, 26 Agustus 2003).

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

Menurut pengamatan dan penelitian Abuza, disana jelas terlihat adanya pembagian regional di Asia Tenggara dan Ba'asyir memegamg peranan penting di dalamnya. Dimana Baasyir saat ini sebagai tersangka terorisme di Indonesia dan salah satu penasihat sepiritual Jamaah Islamiyah (JI).

Jumlah total anggota Jamaah Islamiyah telah diperkirakan dalam kisaran 500 ribu-an. Walau bagaimanapun pengaruhnya telah melebihi angka ini. Banyak anggota laki-laki telah di didik pada pesantren JI yang mana Ba'asyir dan Sungkar adalah radikalis yang juga pengajar. JI juga dengan semangat mencari aliansi-aliansi yang mana pada beberapa waktu telah di-*adhoc*, dengan jaringan yang bebas dan organisasi-organisasi yang satu pendirian dan JI menambah pelatihan kemampuan militer.

Pada 1999 pemimpin JI mengatakan telah mendirikan *Rabitatul Mujihidin* (RM) sebagai grup jihad regional, yang meliputi Aceh, Thailand, Burma and Bangladesh, dengan tujuan membuat organisasi baru yang termasuk dalam keluarga JI dan mengkoordinasi kegiatan jihad seperti penyerangan, perolehan senjata bertukar sumber pelatihan, dan penarikan dana RM berencana untuk mengadakan tiga pertemuan semua di adakan di malaysia antara 1999 and akhir tahun 2000.

Interogasi terhadap anggota Jemaah Islamiyah telah mengungkapkan tingginya penyusunan struktur komando. Puncak kekuatan organisasi ini terdapat pada tahun 2000 dan 2001, JI telah membawa lima dewan anggota regional yang diketuai oleh Hambali, seorang koordinator penting dari kegiatan JI dan Al-Qaeda.

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

Baasyir dan Sungkar dijadikan sebagai penasehat spiritual. Dibawah dewan terdapat beberapa fungsional komite dan empat *mantiqis* (diartikan sebagai pasukan regional) Yang ditetapkan tidak hanya dari geografi tapi juga oleh aturan fungsional termasuk pendanaan, indoktrinasi agama, pelatihan militer dan pengadaan senjata.

Jemaah Islamiyah pertama kali menarik perhatian publik Pada Desember 2001, ketika *Singapore's Internal Security Department* (ISD) merazia dua anggota yang hendak menjalankan penyerangan bom bagi warga Amerika, Australia, Inggris dan Israel di Singapura. Kemudian setelah itu rekaman video ditemukan oleh pihak AS yang memiliki kaitan dengan Al-Qaeda di Afganistan. Diikuti dengan penangkapan jaringan komplotan di Malaysia dan Filipina. Dilaporkan juga sel dari JI yang berada di Malaysia mengkoordinasikan jalannya pembuatan material bom Malaysia *coordinated the plot, including the procurement of bomb-making materials,* menyiapkan dokumen travel, dan komunikasi dengan Al-Qaeda.

Setelah ivestigasi dan penangkapan yang memberikan FBI *link* Jemaah Islamiyah pada penyerangan 11September 11 di AS. *Attack on the United States*. Dua dari pembajak 11 September dan Zacarias Moussaoui, yang berada dibawaah dakwaan AS atas keterlibatan dalam 11 September. Pada Juni 2002 polisi Indonesia menangkap tersangka pemimpin Al-Qaeda. Omar al-Farouq warga Kuwait dialihkan kepada milter AS dan setelah tiga bulan investigasi al-Farouq memberi pengakuan bahwa dia adalah senior Al-Qaeda yang mewakili Asia Tenggara dan membocorkan rencana teroris untuk menyerang AS di regional

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

tersebut . Hal ini termasuk rencana Al-Qaeda/JI melakukan aksi pengeboman berkala oleh mobil/truk untuk menyerang AS, yang terdapat di Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan kamboja selama satu tahun peringatan 9/11(Ratnesar, CRS Report for Congress, 2005.15)

Pada basis informasi yang lain staf Adminstrasi Bush menutup kedutaan besar AS di beberapa negara untuk beberapa hari , dan meningkatkan level ancaman standar menjadi tinggi. Di bawah interogasi Al-Farouq mengatakan Ba'asyir sebagai pemimpin spiritual JI dan salah satu perenacana serangan September 2002. Untuk beberapa bulan, Malaysia dan Singapura juga mendakwa Ba'asyir sebagai pemimpin JI. Malaysia dan Singapura pun bergabung dengan Amerika Serikat dalam meminta Indonesia untuk menangkapnya. Berbahayanya, Jemaah Islamiyah dan Al Qaeda terlihat jelas ketika 12 Oktober 2002, yakni terjadi pengeboman di klub malam di Bali, yang acapkali disinggahi oleh turis Barat. Korban meninggal diperkirakan 200 dan 300 terluka, sebagian besar warga Australia dan Indonesia tapi juga termasuk beberapa warga Amerika, juga Kanada, Eropa, dan Jepang.

Pengeboman yang paling mematikan setelah 11 September di AS, memberikan tanda perubahan strategi JI. FBI melaporkan pada awal 2001 bahwa senoir JI melakukan pertemuan di Thailand dan memutuskan menyerang dengan cara "*softer targets*" di Asia seperti tempat-tempat yang sering didatangi turis Barat (Jay Solomon and James Hookway, "*Bali Bomb Suspect Used Thailand as Staging Area,"The Wall Street Journal*, November 7, 2002).

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

3.2.1 Perkembangan Terorisme di Indonesia

Indonesia memiliki daya tarik untuk teroris Islam hal ini dikarenakan lemahnya kontrol pemerintah pusat dan pertimbangan sosial juga ketidakstabilan politik dan banyaknya populasi Muslim. Kontrol pemerintah pusat terjadi sejak 1997 pasca krisis finansial dan penggantian rejim Soeharto pada 1998 yang, dengan pemerintahan yang lebih demokrasi tapi juga lebih lemah.

Berawal dari tragedi bom Bali I pada tahun 2002 kejadian hingga membuat PBB mengeluarkan resolusi 1438 DK PBB dan menekankan masalah terorisme untuk menjadi prioritas utama politik luar negeri Indonesia dan ASEAN.

Walaupun PBB telah mengeluarkan resolusinya namun teror bom terus berlanjut. Kali ini menimpa hotel J.W Marriot pada 5 Agustus 2003 dengan kurang lebih 10 korban meninggal. Seakan tak jera kejadian teror berlanjut yang kemudian terjadi di Kedutaan Besar Australia pada 9 September 2004 dan Bom Bali II pada 1 Oktober 2005 (Thamrin, 2007:50-51).

Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 meningkatkan harapan bahwa pemerintah pusat Indonesia akan lebih tegas dan efektif dalam rangka kegiatan *counterterrorist*. Walaupun banyaknya warga muslim Indonesia mengikuti aturan islam yang moderat, teologi fundamentalis Islam berkembang pesat di Indonesia sebagian kelompok mengambil keuntungan dari masalah intern. Hal ini termasuk pergerakan separatis di beberapa provinsi, resesi ekonomi yang tajam yang berkembang dalam krisis finansial Asia munculnya persaingan dalam kaum elit pemerintahan dan lain-lain.

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

Hingga pada aturan setelah bom Bali 2002, pejabat AS, Singapura, dan Malaysia mengekspresikan ketidakpuasan atas kebijakan Indonesia dalam melawan aksi terorisme. Penyerangan di bali harus membuat Indonesia menanganinya dengan lebih serius. Penyerangan di Bali ini mendorong Indonesia.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk bekerjasama lebih jauh dengan pihak AS. Hal ini dikarenakan AS dapat membantu Indonesia menangani kasus-kasus terorisme. Percobaan hukuman kepada Baasyir telah memberi informasi aktivitas terorisme menjadi lebih jelas (*"A Number of Pesantrens in Central Java Targets," Jakarta Suara Pembaruan*, 16 Juli 2003, FBIS).

Komitmen dalam memerang terorisme ditunjukan Indonesia dengan menjatuhkan hukuman kepada Ba'asyir. Ekstrimis Islam dianggap sangat mengancam politik nasional di Indonesia. Dan Indonesia membutuhkan *investment* luar untuk mewujudkannya. Akhirnya pada 22 Oktober Bush melakukan kunjungan selama 3 jam ke Bali, yang dilakukan untuk memeperkuat kerjasama bilateral dalam *counterterror*. Dalam *joint statement*, Bush dan Presiden Megawati berjanji untuk meningaktkan kerjasama dalam memerangi terorisme, termasuk di dalamnya kapasitas dalam berbagi informasi terutama dalam hubungan antar militer *("Joint Statement Between the United States of America and the Republic of Indonesia," The White House*, 22 Oktober, 2003.)

Kunjungan Presiden Bush, diikuti dengan kunjungan Kejaksaan Umum John Ashcroft dan Sekretaris *Homeland Security*, Tom Ridge. Ashcroft

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

menghadiri konferensi *counter terrorism* yang dipimpin oleh perwakilan Australia dan Indonesia di Bali pada Februari 2004 yang diikuti oleh 26 negara.

Amerika Serikat dan Indonesia akhirnya bekerjasama pada bidang lainnya yakni kepolisian dan keamanan, penegak hukum, legislator, kantor imigrasi, perbankan, dan lainnya seperti intelejen finansial. Kemudian program lainnya termasuk pelatihan penyelenggaraan kerjasama dalam *counterterrorism* di bidang militer Indonesia dimana program yang diberi oleh AS yakni pelatihan Unit Polisi Nasional "Datasemen Khusus 88" (Densus 88). Untuk tujuan ini telah dialokasikan dana sebesar $5 juta, termasuk investigasi program, *Explosives Incidents Countermeasures, Crisis Response,* dan pelatihan anggota (*Information drawn from State Department Fact Sheet "Summary of Counter Terrorism Assistance for Indonesia*," 10/03 update.)

Perhatian yang besar dari Bush untuk menangkap para teroris pelaku peledakan bom di Indonesia akhirnya menjadi agenda yang sangat rasional untuk dijalankan. Indonesia tidak mempunyai alasan untuk mengelak dari intervensi AS. Hal ini disebabkan: pertama, AS-lah negara pertama yang mendapat seranagan teroris yang mana menyebabkan perang melawan terorisme menjadi agenda utama dari segenap kebijakan Bush; kedua, intervensi AS diperkuat dengan adanya kesepakatan *Memorandum of Understanding On Comabatting International Terrorism (MOUCTI)* dengan Indonesia yang telah ditandatangani sendiri oleh Megawati. Yang harus deiketahui bahwa MOUCTI adalah kesepakatan AS-Indonesia setelah tragedi 9/11 (Thamrin, 2007:55).

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

3.2.2 Perkembangan Terorisme di Filipina

Filipina mengecam keras kejadian 11 September 2001 Presiden Gloria Macapagal-Arroyo dan Presiden Bush setuju pada pengerahan personil militer AS di Filipina Selatan untuk melatih militer Filipina dalam melawan grup teroris Abu Sayyaf. Kedua presiden mengumumkan pada 20 November 2001 sokongan dana sebesar $92 dan $55 untuk bantuan militer di wilayah muslim pada tahun 2001 dan 2002 (Steven Mufson, *"U.S. to Aid Philippines' Terrorism War," Washington Post*, 21 November 2001).

Jumlah militer Amerika dikerahkan antara Januari 2001 dan 31 Juli 2002 mendekati 1,200 termasuk 150 bagian khusus. Pelatihan diberi nama "Balikatan" atau *"shoulder-to-shoulder"*, termasuk pengerahan 300 pasukan, umumnya insinyur angkatan laut, ke daerah Filipina Selatan yang berada dibawah serangan Abu Sayyaf yang mana pulau yang juga termasuk pusat berkembangnya aktivitas grup tersebut.

Pelatihan balikatan dilaporkan mengurangi kekuatan Abu Sayyaf di Basilan.Operasi *Armed Forces of the Philippines* (AFP) meningkatkan kegiatan intelejensi suplay peralatan modern AS untuk membantu rencana operasional. (Gloria, Glenda M. "Training days." *Manila Newsbreak* July 8, 2002, *Schmitt, Eric. By aiding needy Filipinos, G.I.'s could help rout the rebels. New York Times*, 15 Juni 2002. Hal. A6.)

Kemudian fokus AS pada Abu Sayyaf dikomplikasikan dengan berkembangnya eksistensi dua grup yang lebih besar *Moro National Liberation Front* (MNLF) dan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF). Kedua grup diyakini

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

telah bermaksud untuk menyerang pemerintahan Filipina, dengan perkiraan berkekuatan kelompok 10,000. Objek politik utama mereka adalah dengan memerdekakan wilayah Filipina Selatan. Bukti dapat terlihat dari pemimpin JI yang tertangkap telah diketahui adanya hubungan yang kuat antara MILF dan JI termasuk dengan berlanjutnya *camp* pelatihan teroris JI dalam MILF. Pelatihan ini menjadi sangat penting bagi kemampuan Jmaah Islamiyah untuk mengisi kembali kader di Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Kelanjutan bukti bahwa MILF menyediakan pelatihan bagi JI dapat terlihat dari tim Malaysia yang melakukan observasi pada Maret 2004 dan memperingatkan pemimpin MILF untuk mengakhiri ikatan dengan Jemaah Islamiyah. Tim Malaysia adalah pelopor tim Internasional yang lebih besar yang memonitor jalannya gencatan senjata pada Oktober 2004.

Babak baru pembicaraan politik antara pemerintah Filipina dan MILF diadakan pada awal tahun 2005. Presiden Bush berjanji untuk diplomasi AS dan memberi dukungan finansial jika MLF benar-benar setuju bernegosiasi (Bumiller, Elisabeth. *"Bush Affirms U.S. Is Ready to Send Troops to the Philippines."New York Times*, 20 Mei 2003. p. A15.)

Amerika Serikat dan Filipina telah mencoba untuk bernegosiasi yang kedua kalinya dalam melatih dan mendukung angkatan bersenjata Filipina (AFP) sejak akhir 2002. Asm memberikan bantuan dana militer baru sebesar $ 25. Berlanjutnya pengeboman yang dilakukan Abu Sayyaf membuat Departemen Keamanan Filipina mempertimbangkan untuk memperpanjang program bantuan AS di Filipina Selatan yang fokus terhadap konsentrasi Abu Sayyaf di Jolo. Pihak

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

AS juga menemukan bukti yang kuat antara Abu Sayyaf dengan grup teroris internasional

Pada Februari 2003, pihak Pentagon menggambarkan rencana dimana AS berkomitmen pada 350 operasi bersenjata khusus di Jolo dengan tentara dan angkatan laut Filipina dalam level 20-30 pasukan, 400 pasukan yang lain akan berada di Zamboanga di pulau utama Mindanao.

Presiden Arroyo dan AFP mengumumkan persetujuannya pada rencana kedua fase aktivitas *joint military activity* Filipina pada 4 Februari 2003. Pengumuman tersebut secara serentak menyebabkan kontroversi di Filipina. Pemimpin Muslim mengingatkan Muslim backlash di Mindanao, Ahli di Filipina dan pemimpin masyarakat untuk tidak mendukung aturan perang AS karena mengingat sejarah aneksasi AS di Filipina pada tahun 1898 (Nakashima, Ellen and Graham, Bradley. *"Missed Signals Forced Suspension of U.S.- Philippine Mission." Washington Post, 3 Maret, 2003. hal. A12.)*

Pada Mei 2003 Militer AS mengatakan bergabung dengan program kerjasama untuk menunda pembidikan Abu Sayyaf di Jolo hingga pelatihan terbaru terselesaikan. Sementara itu wakil Departemen Dalam Negeri Aroyyo mengunjungi *White House*. AS mengumumkan program baru pelatihan batalion AFP dengan biaya sebesar $65 ($30 untuk bantuan ekonomi di Mindanao) dan mendesain rakyat persekutuan utama Non-NATO Filipina.

Pada kunjungannya pada Oktober 2003 Bush menggambarkan aliansi AS-Filipina sebagai *"rock of stability in the Pacific"* dan berkomitmen Amerika menyediakan bantuan material dan pendanaan untuk membantu me-modernisasi

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

milter Filipina, dia juga berkata bahwa AS dan Filipina memiliki tujuan objektif yang sama yakni membawa Abu Sayyaf ke pengadilan dan melanjutkan kerjasama untuk menangani JI (http://www.whitehouse.gov.*Remarks by the President to the Philippines Congress,"* Manila, Philippines, *October* 18, 2003, diakses pada 10 Juni 2011)

3.2.3 Perkembangan Terorisme di Malaysia

Pada tahun 1999 dan 2000 beberapa operasi JI dan Al-Qaeda yang terlibat dengan 9/11 dan *USS Cole attacks* menggunakan Kuala Lumpur sebagai tempat pertemuan. Berdasarkan pada pengakuan pemimpin Al-Qaeda yang tertangkap Malaysia dilihat sebaga lokasi yang ideal untuk transit dan tempat pertemuan karena mengijinkan *visa-free entry* untuk negara-negara *Gulf states*, termasuk Saudi Arabia.

Menurut FBI Malaysia menjadi tempat logistik yang penting bagi Al-Qaeda dan beberapa rencana disusun disana. Dua dari pembajak 11 September, Khalid Al Mindhar dan Nawaq (Salem) Al Hazmi, diketahui oleh pihak intelejensi Malaysia mengadakan pertemuan dengan bin Laden, juga dalam pertemuan ini dikenal nama seperti Tawfiq bin Atash, dan Ramzi bin Al-Shibh (Abuza, 2002 : 30).

Perdana menteri Malaysia Mahatir Muhammad, sebagai penyeru non-kekerasan Muslim membuka kritik teroris islam setelah 11 September termasuk pembom bunuh diri Palestina. Dilihat dari kerjasamanya Mahatir diundang ke Washington D.C dan bertemu dengan Presiden Bush pada pertengahan Mei 2002. Selama kunjungan tersebut AS dan Malaysia menandatangani kerjasama

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

Memorandum of Understanding (MOU) dalam *counter-terrorism*. Teks dalam dokumen tersebut adalah basis setelah deklarasi *counter-terrorism*, yang diselenggarakan AS dan ASEAN yang ditandatangani Agustus 2002 di dalam pertemuanASEAN Regional Forum (ARF) U.S (http://usembassymalaysia. org.my/amsp0222.html, *Embassy, Malaysia, Speech by U.S. Ambassador Marie T. Huhta, Rotary International Dinner Forum, Kuala Lumpur,* Malaysia 22 Februari 2003, diakses 10 Juni 2010).

Staf Administrasi Bush juga telah memutuskan menjalankan konsentrasi HAM di Malaysia yang digunakan pada *Internal Security Act* (ISA) untuk membebaskan oposisi politik tanpa percobaan, khususnya sejak Kuala Lumpur menggunakan ISA untuk melawan tersangka anggota JI Kampulan Mujiheddin Malaysia (KMM) (U.S. State Department, *Patterns of Global Terrorism 2001* hal123-24).

Parti lslam se-*Malaysia* (*PAS*) dianggap memiliki hubungan yang kuat dengan KMM, mereka dibawah pembelaan atas keyakinan jihad yang diusingnya, dimana mereka menginginkan dibunuhnya tentara AS, karena dianggap telah mengekang secara terus-menerus negara-negara Islam. Grup ini didirikan pada tahun 1999 oleh Nik Aziz dan Nik Adli. Menurut PM Mahatir berbicara mengenai kritiknya terhadap PAS yang terkait kedalam ekstrimis Afganistan dan Pakistan, bahwa semua anggota PAS melihat jalan demokrasi tidak akan membawa kekuatan bagi mereka, maka dengan itu mereka mengambil jalan secara militan.

Di samping itu malaysia telah menjadi pusat dari beberapa insiden teroris internasional dan ada keterkaitan dengan Inodenesia sebagai negara tetangga. 16

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

pejuang suci Malaysia terdapat di Indonesia untuk melakukan pengeboman di beberapa mall dan gereja di Indonesia. Sel teroris Malaysia telah membuat jaringan secara internasional. Nik Adli, melengkapi persenjataan di Thailand dan menerima instruksi pembuatan bom di Filipina.

Kemudian, Malaysia juga tidak hanya telah lama menjadi pusat Islamic banking di Asia Tenggara tapi juga di seluruh dunia. Hal ini membuat adnaya ikatan yang kuat dengan Timur Tengah. Al Fadl sebagai anggota resmi Al-Qaeda juga sebagai former financer resmi Al-Qaeda yang berhubungan dengan bin Laden, dimana memiliki konstruksi investmen firma di Malaysia (Abuza, 2002 : 36). Tentu saja hal ini memudahkan anggota jaringan terorisme dalam masalah finansial di Asia tenggara.

Pada akhirnya, Mahatir mengunjungi Washington D.C pada Mei 2002 yang menyimbolkan perubahan postur fundamentalnya pada AS, walaupun Mahatir mengkritik serangan AS ke Irak dan pembatasan Visa untuk warga Malaysia ke Amerika. Singkatnya pada akhir 2003 Perdana Menteri baru Malaysia Abdullah Ahmad Badawi berjanji melanjutkan dukungannya dalam perang melawan teror ("Malaysia Pledges Terror Fight," *The Wall Street Journal*, 4 November, 2004).

Selama konferensi *Counterterorrism* di Bali pada Februari , dilaporkan bahwa Jaksa Agung Ashcroft memberikan selamat kepada usaha anti-terorisme Malaysia yang membuat progres dalam :

> *"Mutual Legal Assistance Treaty* (MLAT) (*The MLAT "Will establish cooperation for the prosecution of terrorist suspects in bothcountries. It will also assist in the exchange of witnesses and in terrorist*

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

> *investigations.“U.S. Compliments Malaysia for Role in Anti-terror Efforts,” Bernama Daily*, 5 February 2004).
>
> “Kami akan menegakkan kerjasama untuk penanganan tersangka teroris di kedua negara. Kemudian akan juga memberikan pertukaran bantuan dalam investigasi teoriris”.

Organization of Islamic Conference (OIC) P.M. Abdullah Badawi melaporkan pemanggilan dari AS untuk mengubah politik luar negerinya dalam penyaringan persepsi yang diselenggarakan oleh banyak pemeluk Islam di dunia dalam hal ini anti-*Islamic*. *Mainstream* Islam di Malaysia berubah menjadi karakter yang moderat.

Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Abdullah Badawi melaporkan untuk mencari ikatan bilateral yang kuat dengan AS selama pertemuannya pada Juli 2004 dengan Presiden Bush di Washington (Bruce Vaughn, CRS Report RL32129, *Malaysia: Political Transition and Implications for U.S. Policy*,)

Walaupun tidak mengkritik kebijakan AS, seperti pada masalah Israel/Palestina, Badawi adalah pemimpin Islam moderat yang memberikan indikasi bahwa Malaysia akan melanjutkan *partenerhip* yang menghasilkan dalam perang melawan teror yang mengancam Asia Tenggara (*Speech by The Honorable* Abdullah Badawi, *Prime Minister of Malaysia*, Washington, D.C 19 Juli 2004).

Badawi berkeinginan kuat dalam perang melawan teror ditangani hingga ke akarnya dan mengatakan*“for every one we kill, five more will emerge to continue their struggle.”* (“Disquiet as Bush Dominates Agernda at Asia Pacific Sumit,” *Agence France Presse*, 21 November 2004).

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

3.3 Media Massa dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

Ada tiga model yang dapat digunakan untuk melihat peran media dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Pertama, dikemukakan Glenn Snyder bahwa pembuat keputusan bertindak sebagai reapon terhadap kondisi dan faktor-faktor yang terjadi diluar lingkungan internal pemerintah tempat mereka terlibat. Setting internal dideskripsikan sebagai lingkungan manusia yang terdiri dari kultur budaya dan populasi, yang secara otomatis di dalamnya termasuk opini publik (Snyder1969: dalam Naveh, 2002 : 201-203).

Dalam hal ini media bisa dikatakan sebagai komponen terbesar dari lingkungan internal kebijakan luar negeri. Media bisa dikatakan sebagai alat yang menunjukan interpretasi dan ekspektasi aktor non-pemerintah dari berbagai kelompok masyarakat sebagaimana dapat pula dikatakan sebagai alat untuk mensosialisasikan kebijakan dan agenda oleh pemerintah. Michael Brecher mengembangkan model yang lebih detail mengenai kerangka kerja dalam proses perumusan kebijakan dengan menyebut media sebagai “Jaringan komunikasi dalam sistem politik yang memungkinkan aliran informasi tentang lingkungan operasional pada elite” (Brecher 1972 : 182-207, dalam Naveh, 2006).

Brecher dan Snyder mengatakan media sebagai komponen internal dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, saluran untuk mengirim pesan dari lingkungan diplomatis-politis yang aman kepada pemimpin, beberapa persfektif menegaskan bahwa media sebagai bagian dari lingkungan internasional dapat mempengaruhi kebijakan dan melihat televisi dan pers sebagai komponen sumber

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

dan variabel lain seperti struktur *power regional*, kapabilitas ekonomi aktor lain, dan sebagainya.

Singkatnya proses perumusan kebijakan luar negeri dilakukan dalam lingkungan yang sebagian diciptakan oleh media. Peran media dalam lingkungan ini ditentukan oleh rezim komunikasi politik negara, kebijakan komunikasi pemerintah, struktur ekonomi politik, dan saluran ekonomi khusus yang relevan dengan fungsi media. Atmosfer yang diciptakan media ini merefleksikan *event* kebijakan, dan mendorong mereka untuk merespon melalui media, dengan karakteristik spesifik (Naveh, 2006 : 10).

Karena begitu pentingnya informasi komunikasi bagi arah dan tujuan politik luar negeri dan kebijakan-kebijakan luar negeri AS, maka di dalam *Departement of State* atau departemen luar negeri AS memiliki *The Bureau of International Information Programs* (IIP) yakni sebuah prinsip strategi komunikasi internasional yang melayani komunitas hubungan luar negeri. IIP ini merancang, mengembangkan, dan mengimplentasikan berbagai inisiatif informasi strategi program komunikasi, termasuk internet, dan publikasi cetak, program traveling dan gelombang elektronik, dan pelayanan sumber informasi. Rancangan yang dibuat tersebut ditujukan untuk pemirsa/*audience* internasional. Dapat berupa media, lembaga pemerintah, dan penggiring opini, dan publik umum di lebih 140 negara di seluruh dunia (Landay, State Dept vetted speakers for criticism of Bush Administration", McClatchy Newspapers, November 1, 2006).

The Department of State's Bureau of International Information Programs (IIP) pada saat ini mengumumkan kemampuannya dalam mendukung tercapainya

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

tujuan kebijakan luar negeri dan kepentingan kemanan nasional melalui produk-produk informasi dan aktivitas-aktivitas perjanjian.

Menurut koordinator IIP Dawn McCall " Adanya perubahan lingkungan komunikasi global, dan kita harus tetap menghadapinya. Perubahan ini akan membuat program Bureau of International Information secara cepat meraih efektifitas dimana, orang-orang di seluruh dunia mendukung prioritas kebijakan luar negeri AS.

IIP memproduksi program dan produk yang dikeluarkan dan menarik *audience*, termasuk publikasi cetak, material web, dan program audio, dan ini menarik 280 pegawai di Washington DC dan diluar negeri.

Produk-produk IIP termsuk pada layanan-layanan berikut:

1. Publikasi yang dicetak; brosur, pamflet, surat kabar, dan buku
2. Publikasi elektronik; halaman web, jurnal elektronik, dan CDROM'FAM 343)
3. File Washington (kompilasi harian dari lembaga yang berupa teks, transkrip, isu-isu kebijakan AS, artikel, dan rangkuman-rangkuman yang secara langsung dapat diakses oleh masyarakat di luar negara melalui internet
4. *The Foreign Service* (FS) File (kumpulan pengumuman-pengumuman yang dapat mempengaruhi kebijakan diluar)
5. Dan beberapa program dan layanan informasi lainnya yang bisa diakses dengan jelas melalui *Foreign Affair Manual* (FAM)

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

(http://www.state.gov/documents/organization/88252.pdf, diakses 23 Juli 2011)

Dimana FAM adalah produk yang dipublikasikan oleh departemen luar negeri AS dan dapat diakses di dalam *website*-nya. FAM melingkupi fungsional *statement*, tanggung jawab organisasional, dan kewenangan komponen satu sama lain dalam Departemen Luar Negeri AS (http://www.state.gov/, diakses 23 Juli 2011).

Dari uraian-uraian di atas telah kita ketahui segala produk komunikasi termasuk media cetak dan elektronik telah ada dimuat dengan khusus dan lengkap dalam Departemen Luar Negeri AS, karena hal ini menyangkut tercapainya kepentingan, dalam kebijakan nasional dan juga strategi keamanan AS. Karena bagi AS dalam komunikasi global seperti ini teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mencapai tujuannya pada masyarakat global melalui jaringan telekomunikasi.

3.3.1 Media Cetak Amerika Serikat

News Cooperation adalah salah satu konglomerasi media terbesar di dunia milik Rupert Murdoch. Jaringan dan distribusinya tersebar di seluruh penjuru dunia dan mampu menjadi alternatif utama di masing-masing kelas. Seperti *The Australia, The Weekly* Australia, dan *The Sunday Herald* Sun yang merupakan koran utama Inggris atau The New York Post yang bisa disejajarkan dengan New *York Times* di AS. Majalah *The Weekly* adalah majalah politik terpandang di Washington. Begitu juga dengan program berita lainnya, *Fox News Channel*.

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

Murdoch adalah pendukung rezim konservatif Bush dan Partai Republik. Ia dikenal sebagai tokoh neokonservatif yang aktif mensponsori setiap kebijakan presiden memlalui jaringan medianya ini (Retnachrista, Peran News Cooperation dalam Kebijakan Luar Negeri AS Menginvasi Irak Maret 2003. *Global and Strategic*, Th I, No 2 Juli-Desember 2007)

Dikaitkan dengan kejadian tragedi 11 September di AS, yang mendorong invasi Bush ke Irak tak dapat dilepaskan dari peran beberapa media korporat besar yang aktif menyoroti perkembangan di tiap negara dunia ketiga termasuk Asia Tenggara. Sebagai salah satu sumber informasi yang dapat dipastikan kebenarannya, media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan, dan berikut contoh-cobtoh media cetak Amerika Serikat:

Tabel 3.3.1
Contoh-contoh media cetak Amerika Serikat

No.	Nama Media	Sirkulasi	Dominasi Kepemilikan
1	*The Times Magazine*	Asia, Eropa, Timur Tengah, Afrika, Pasifik Selatan, Kep. Pasifik	*Time Inc. (Time Warner)*
2	*Wall Street Journal*	USA, Asia, Eropa	*Dow Jones & Company (owned by News Corporation)*
3	*New York Times*	USA	*The New York Times Company*
4	*USA Today*	USA, *United Kingdom*	*Gannett Company, Inc.*
5	*Newsweek*	USA, Asia, Eropa, Afrika, Timur Tengah	*The Newsweek Daily Beast Company*

Sumber: Dari berbagai sumber (data diolah sendiri)

Media cetak yang terbit di Amerika Serikat tersebut, beberapa terbit secara internasional. Media cetak merupakan media yang penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat karena media ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

sehari-hari masyarakat. Dan media cetak ini berperan dalam kinerja pembuatan dan penyebaran informasi kebijakan luar negeri Amerika serikat.

Proses keterlibatan media sangat kompleks, namun bisa disederhanakan menjadi dua hal. Pertama, media sebagai sumber input bagi pembuatan keputusan, dan kedua, media sebagai lingkungan yang harus disesuaikan dan dipertimbangkan pemimpin dalam pembuatan kebijakan. Pemimpin dan pembuat kebijakan luar negeri memang dipengaruhi media. Mereka mempelajari peristiwa yang terjadi dalam sistem internasional dari pers, dan berbagai pesan yhang masuk dari arena percaturan politik global melalui saluran komunikasi publik. Dalam tataran ini media bertindak sebagai sumber, bagian dari lingkungan input proses perymusan kebijakan yang menyediakan informasi dan data bagi elit pemimpin (Retnachrista, "Peran *News Corporation* dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Menginvasi Irak (Maret 2003)" *Global&Strategy*, Juli-Desember 2007:144).

Anindyo J. Majundar dan Shibasis Chatterjee secara khusus memberikan ulasan mendalam mengenai peran media dalam pengambilan kebijakan luar neger AS. Ada tiga premis utama yang dihasilkan. Pertama elit pembuat kebijakan luar negeri tetap menarik bagi media. Kedua media dan perumusan kebijakan terpaku pada hubungan mutual yang eksploitatif. Ketiga media dan pemerintah bisa berjalan searah sebaliknya, bisa berlawanan selama proses perumusan kebijakan luar negeri (Majundar dan Chatterjee, 2004:356)

Mengutip Chomsky (1988;1991;1998), dinyatakan bahwa media AS, yaitu terkonsentrasi pada isu tertentu, terjerat konglomerasi (media korporat),

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

didanai dan disetir pemerintah dan bisnis, mendapat tekanan dari sayap kanan (konservatif), dan tergantung pada sumber berita terbatas. Media-media *mainstream* adalah kepanjangan tangan dari propaganda negara, dan kebebasan pers menjadi bagian sistem mekanisme indoktrinasi agen untuk memanipulasi opini publik (Majundar dan Chatterjee, 2004:356).

3.3.2 Media Elektronik Amerika Serikat

Media baru diakui memiliki kekuatan pengaruh terhadap kebijakan luar negeri mulai dari 1990, dengan munculnya *"CNN effect"* yang merupakan keberhasilan CNN untuk mempengaruhi opini publik selama peliputannya dalam perang teluk. Untuk pertama kalinya CNN memberikan penggambaran melalui sudut pandang berbeda dan menyuguhkan sesuatu yang dapat didengar dan dilihat oleh pemirsa, George Kennan mengatakan bahwa keputusan yang monumental dibuat oleh stmulus-stimulus populer yang disetir oleh industri televisi komersial (Retnachrista, "Peran *News Corporation* dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Menginvasi Irak (Maret 2003)" *Global&Strategy*, Juli-Desember 2007:143).

Hal di atas membuktikan bahwa media elektronik dalam hal ini televisi juga sangat memegang peranan penting dalam perkembangan mempengruhi opini publik melalui kebijakan luar negeri yang ditayangkan oleh media elektronik AS. Terlebih hampir semua media massa cetak dan elektronik memiliki jaringan *online*, yakni jaringan internet yang dapat di akses hampir diseluruh belahan dunia

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

secara mudah. Dan berikut adalah contoh media elektronik AS sebagai media visual TV *broadcast* sekaligus *online* :

Tabel 3.3.2
Contoh-contoh media elektronik AS:

No.	Nama Media	Sirkulasi	Dominasi Kepemilikan
1	*VOA (Voice of America)*	*USA, Worldwide*	*Federal government of the United States*
2	*CNN (Cable News Network)*	*USA, Worldwide*	*Turner Broadcasting System, Inc. (a Time Warner company)*
3	*NBC (National Broadcasting Company)*	*USA, Worldeide*	*NBCUniversal*
4	*Fox News*	*USA, Worldeide*	*Fox Entertainment Group (News Corporation)*
5	*CBC Newa*	*USA, Worldeide*	*CBC*

Sumber: Dari berbagai sumber (data diolah sendiri)

Kebijakan luar negeri suatu negara. Patrick O'Heffernan dalam *Mass Media and American Foreign Policy: Insider Persfective on Global Journalism and the Foreign Policy Pocess (Norwood, NJ: Ablex Publishing Coprs, 1991)* menyebutkan bahwa sebagai penyedia informasi yang relatif cepat dan akurat, media bisa menjadi sumber pertimbangan utama seorang aktor dalam mengambil kebijakan luar negeri, terutama di AS (Grabber, 2000:292-303).

Maka pada kasus invasi ke Irak Bush menggunakan informasi yang berhasil dihimpun jaringan berita *News Cooperstion* dan disebarluaskean melalui *Fox News. News Corps* dikatakan sebagai jaringan media yang paling berperan dalam pembuatan kebijakan luar negeri Bush pada saat itu.

AS memandang perlu mengadakan perang terhadap pemikiran-pemikiran untuk memenangkan pertempuran melawan terorisme internasional dengan cara *soft power*-nya yakni dengan mengeluarkannya *National Security Strategy of The*

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

United States of America, 2002 dengan pemanfaatan media. Hal ini bisa kita tangkap dari poin:

1. Mendukungi pemerintahan moderat dan modern khususnya dikawasan dengan penganut mayoritas muslim, untuk menjamin bahwa tidak ada tempat dimana kondisi dan ideologi yang membantu kemajuan perkembangan terorisme
2. Mengurangi kondisi-kondisi yang menimbulkan terorisme dengan cara membuat masyarakat internasional untuk fokus terhadap sumber-sumber yang menimbulkan kondisi tersebut
3. Mempergunakan diplomasi publik yang efektif untuk memajukan aliran informasi yang bebas untuk membangkitkan harapan-harapan dan aspirasi kebebasan dalam lingkungan yang *ruled by the sponsors of global terorism.*

   (*National Security Strategy of The United States of America*, 2002).

Atas dasar inilah maka Bush memanfaatkan fungsi media seefektif mungkin dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri maupun pemaanfaatan dalam hal mempengaruhi opini publik internasional.

Di AS sendiri media memiliki potensi besar mempengaruhi opini publik yang akhirnya menjadi *input* bagi presiden untuk merumuskan kebijakan luar negeri. Ini tidak terlepas dari masyarakat AS sendiri yang menjadikan media, terutama televisi dan surat kabar.

Secara teknis, media juga menyediakan informasi dengan sangat cepat dan dapat memenuhi kebutuhan publik atas informasi tersebut kapan saja. Contohnya

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

kantor berita *Cable News Network* (CNN) menyiarkan berita 24 jam sehari dalam seminggu. Setiap menit memungkinkan untuk tersela *breaking news* yang memuat berita-berita darurat.

This page was created using **NitroPDF** trial software.
To purchase, go to http://www.nitropdf.com/